



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

PERINGATI SUMPAN PEMUDA: Puluhan mahasiswa dan mahasiswi dari Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Bali menggelar demo di Jalan Raya Puputan, depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon, kemarin.

Mahasiswa Se-Bali Sampaikan 4 Tuntutan

DENPASAR - Bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, ratusan mahasiswa dari seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali, kemarin (28/10) menggelar aksi damai di depan halaman gedung DPRD Bali. Ada empat poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dari sejumlah universitas di Bali seperti Undiknas, Universitas Udayana, Universitas Diana Pura, Undiksa, dan UNHI

► Baca *Mahasiswa...* Hal 31

Minta Cabut Perpres Teluk Benoa

■ MAHASISWA

Sambungan dari hal 21

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana Ni Nyoman Clara Listya Dewi mengatakan, empat poin tuntutan mahasiswa itu sebagai bentuk kritik sekaligus evaluasi kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama setahun.

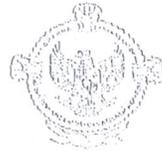
Disebutkan, empat poin tuntutan, itu yakni stabilitas ekonomi, pemberantasan korupsi, pembakaran lahan dan penanganan kabut asap, serta desakan untuk segera mencabut Perpres

No. 51 Tahun 2014 dengan mengembalikan fungsi awal kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. "Selain isu-isu umum dan nasional, yang paling mendesak terhadap isu kedaerahan adalah soal reklamasi Teluk Benoa. Kami ingin di momen Sumpah Pemuda ini, mahasiswa bicara dan mengevaluasi kinerja pemerintah Presiden Jokowi," tegasnya.

Selain menyampaikan tuntutan kepada wakil rakyat di DPRD Bali, imbuhan Clara, para demonstran yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bali, ini juga menyampaikan tuntutannya kepada anggota DPD RI Dapil Bali Gede Pasek Suardika. (pra/yes)

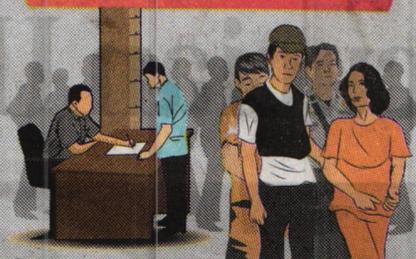
Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31



Ditahan, Keluarga Histeris

Proses Penahanan Tersangka SPPD



1. Sekitar pukul 10.30, rombongan dari penyidik Direskrimsus Polda Bali, bersama 14 tersangka tiba di Kejari Gianyar untuk menjalani pelimpahan tahap kedua.

2. Sekitar pukul 15.30, satu persatu keluarga tersangka, terlihat datang ke Kejari Gianyar. Bahkan salah seorang kerabat tersangka, terlihat menangis histeris di halaman Kejari Gianyar.

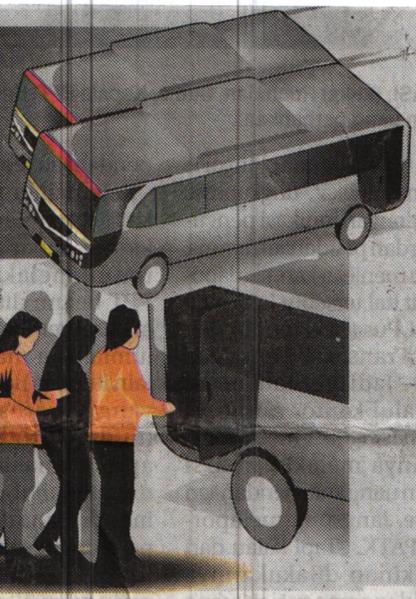
4. Tepat pukul 16.00 para tersangka yang sudah selesai mengikuti proses pelimpahan, akhirnya turun dari lantai dua. Para tersangka ini pun langsung menutupi wajah mereka, termasuk berlingkang dari balik punggung para kerabatnya menuju bus tahanan.

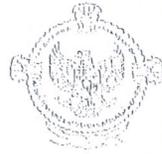
Terkait Kasus SPPD di Gianyar

GIANYAR - Rekor Kejari Gianyar yang tidak melepaskan para tersangka korupsi sampai kemarin (28/10) masih terjaga. Pasalnya, pada pelimpahan tahap kedua kasus dugaan korupsi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) terhadap 14 tersangka kemarin, Kejari Gianyar melanjutkan tradisinya. Yakni menahan para tersangka usai proses pelimpahan selesai. Menjelang penahanan, beberapa kerabat tersangka tampak menangis histeris

► Baca **Ditahan...** Hal 31

3. Beberapa menit kemudian, bus tahanan Kejari Gianyar keluar dari kandangnya dan standby di parkir depan.





Sambungan - - -

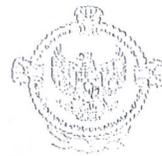
Mereka yang Ditahan	
Nama	Jabatan
1. Dewa Made Putra	Sekretaris Camat Tampaksiring
2. Ketut Ritama	Kasi Ketemtraman dan Keteriba Kec. Ubud
3. SA Made Ika Kencana D	Sta Camat Tampaksiring
4. Ni Ketut Juniantari	Sta Dinas Perhubungan
5. I Ketut Puja	Sta Camat Tegallalang
6. I Made Darmaja	Sta Camat Gianyar
7. Komang Yastara	Sta Camat Gianyar
8. I Made Wirawan	PNS Pemda
9. I Nyoman Sulandra	Sta Camat Ubud
10. Ni Wayan Suciasih	PNS Pemda Gianyar
11. Ni Ketut Suniawati	Sta Bagian Hukum Pemda Gianyar
12. Ni Made Ayu Purniasih	Sta Pemda gianyar
13. AAI Agung Yunariawati	PNS Camat Gianyar
14. I Made Suparta	PNS Dinas Pendapatan Gianyar



DITAHAN: Salah satu tersangka kasus SPPD Gianyar langsung ditahan usai proses pelimpahan tahap dua di Kejarj Gianyar, Remarin.

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal. : 21



Mestinya ke Depok, Malah ke Thailand

■ DITAHAN

Sambungan dari hal 21

Pantauan di Kejari Gianyar kemarin menunjukkan proses pelimpahan dimulai sekitar pukul 10.30. Kala itu rombongan dari penyidik Direskrimsus Polda Bali, bersama 14 tersangka tiba di Kejari Gianyar. Namun, kala itu kasak-kusuk apakah usai pelimpahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara, itu bakal berlanjut pada penahanan para tersangka masih belum jelas. Terlebih karena banyaknya para tersangka, proses pelimpahan akhirnya dilaksanakan di aula Kejari Gianyar, yang berada di lantai

dua gedung bercat hijau tersebut. Namun, menjelang pukul 15.30, tanda-tanda bakal dilakukan penahanan perlahan terkuak. Pasanya, satu persatu keluarga tersangka terlihat datang ke Kejari Gianyar. Bahkan, salah seorang kerabat tersangka terlihat menangis histeris di halaman Kejari Gianyar.

Keyakinan akan ditahannya para tersangka, juga terlihat dari keluarnya bus tahanan Kejari Gianyar, yang sebelumnya parkir di bagian belakang kantor Kejari Gianyar, untuk selanjutnya *standby* di parkir depan.

"Ya, lihat saja tanda-tandanya ini," jawab singkat salah

seorang jaksa, ketika ditanya mengenai ditahan atau tidaknya para tersangka.

Tepat pukul 16.00 para tersangka yang sudah selesai mengikuti proses pelimpahan, akhirnya turun dari lantai dua. Para tersangka ini pun langsung menutupi wajah mereka, termasuk berlinggung dari balik punggung para kerabatnya. Tak banyak kata yang keluar, kala para tersangka yang sebagian besar perempuan, itu digiring keluar kantor Kejari Gianyar, dan selanjutnya masuk ke bus tahanan yang langsung meluncur ke Rutan Kelas IIb Gianyar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka-

jar) Gianyar Ketut Sumadana yang ditemui awak media mengatakan, penahanan dilakukan tak lepas dari perintah Kajati Bali. Sebaliknya Kejari Gianyar sebatas melaksanakan perintah, karena peranan lebih besar ada di Kejati Bali.

"Tapi, kalau kami di sini (Kejari Gianyar, Red), pertimbangan penahanan, ya karena korupsi. Selain itu, pertimbangan untuk mempermudah menghadirkan mereka di persidangan. Apalagi tersangkanya banyak. Kedua kemungkinan saling mempengaruhi karena satu sama lain tersangka," ucapnya.

Apakah karena kasus korupsi



si wajib ditahan? "Kalau saya, ya. Karena sebagai efek jera. Kalau tidak ditahan, bagaimana sidangnya dan kasus yang lain. Selain itu, yang berperan lebih banyak kejati. Kami menerima perintah penahanan dari kejati dan kami meneruskan," jawabnya.

Sedangkan terkait penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum tersangka, mantan penyidik KPK ini menegaskan, pihaknya tidak menerima pengajuan penangguhan penahanan. Tapi, permohonan itu diajukan ke Kejati Bali. "Mereka ajukan penangguhan penahanan di Kejati Bali. Kepada saya (Kejari Gianyar) tidak ada. Karena saya hanya meneruskan. Kalau Kejati memutuskan tidak menahan, ya saya tidak tahan," imbuhnya.

"Untuk nasib 10 tersangka yang lain, tanyakan ke Polda Bali. *Kan*, kasusnya masih di sana," pungkasnya.

Sementara itu, Bernadin, kuasa hukum beberapa tersangka yang ditemui usai bus tahanan meninggalkan Kejari Gianyar mengatakan upaya penang-

guhan penahanan sebenarnya sudah dilakukan pihaknya. "Penangguhan penahanan sudah dilakukan. Tapi, kebijakan berbeda-beda," ucapnya.

Selain itu, dalam kesempatan kemarin dia mengklaim tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Karena dia mengatakan, para tersangka mendapatkan *reward* atas pekerjaan mereka. Kemudian ada anggaran dan kliennya pun berangkat.

Namun, dia mengakui apa yang terjadi hanya *lah* kesalahan tujuan. "Sebenarnya hanya kesalahan tujuan. (Mereka) dapatkan anggaran ke Depok, tapi sebagian ke Thailand," ucapnya.

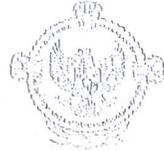
"Semua berangkat, siapa bilang tidak ada berangkat. Jadi, begini, *kan* ada satu tim dalam satu anggaran yang harusnya ke Depok, mestinya ke Depok semuanya. Kesalahan di situ. Padahal tidak ada merugikan keuangan negara. Mereka (berangkat karena) mendapatkan *reward*," tegasnya.

Seperti berita sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini pada akhirnya menyeret 24

tersangka dan ditangani Polda Bali. Dari puluhan tersangka tersebut, 14 di antaranya menjadi satu berkas dan kemarin dilimpahkan ke Kejari Gianyar.

Sebelumnya, Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan mengatakan, sebelum ditahan 14 tersangka ini digiring oleh Penyidik Polda Bali ke Kejati Bali. "Untuk mendapatkan surat pengantar, lantaran proses selanjutnya ke Kejari Gianyar," ungkapnya. "Tahap dua ini adalah pelimpahan alat bukti dan tersangka dari penyidik polda ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Bali. Nanti juga melibatkan jaksa dari Gianyar," sambungnya.

Tim jaksa yang ditunjuk di kejati adalah Gede Arthana, Junaedri Tandi, dan Hari Sutopo. Usai di Kejati Bali, 14 tersangka ini dilanjutkan ke Kejari Gianyar. Sore usai proses di Kejari Gianyar, salah satu JPU Hari Sutopo mengatakan bahwa tersangka langsung diputuskan untuk ditahan. "14 orang itu ditahan di Rutan Gianyar," jelasnya. (wid/art/yes)



Inspektorat Mulai Kumpulkan Data

Oknum Satpol PP Beking Hotel Bodong

SINGARAJA - Inspektorat Kabupaten Buleleng mulai mengumpulkan data, terkait adanya dugaan oknum Polisi Pamong Praja di Kabupaten Buleleng yang menjadi *beking* hotel bodong di wilayah Kecamatan Gerokgak. Saat ini inspektur pengawas di Inspektorat Buleleng baru sebatas dalam tahap pengumpulan data.

Kepala Inspektorat Buleleng Putu Yasa yang dihubungi dari Singaraja, Rabu (28/10) kemarin mengatakan pihaknya sudah mulai mengumpulkan data-data. Pengumpulan data-data itu sudah mulai dilakukan sejak Selasa (27/10) lalu, sehari setelah Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, mengungkap dugaan tersebut.

"Saya ikut langsung waktu rapat gabungan itu, dan saya sudah dengar. Tim kami baru mulai turun kemarin (Selasa, Red). Masih tahap pengumpulan informasi dan data," kata Yasa melalui sambungan telepon, siang kemarin.

Yasa menegaskan timnya sudah bergerak, sebelum muncul instruksi dari Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra. Namun setelah muncul instruksi itu, pi-

haknya akan memberikan laporan tahap awal kepada pimpinan daerah, terkait hasil-hasil temuan di lapangan.

Ia menegaskan proses investigasi bisa saja berjalan dalam waktu sebulan. Pihaknya akan melakukan *cross check* dari informasi yang diperoleh dari Mangku Budiasa, dengan pengakuan dari hotel yang diduga mendapat perlindungan oknum, serta dengan oknum anggota Polisi Pamong Praja itu sendiri.

"Kami punya teknik. Meskipun tidak mengaku menjadi *beking*, tapi kami bisa *cross check* dengan teknik yang lain," imbuhnya.

Nantinya hasil investigasi itu akan dilaporkan langsung kepada pimpinan daerah dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Buleleng. Jika nantinya ditemukan indikasi positif adanya praktik kongkalikong, inspektorat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapek. "Sanksi akan dijatuhkan Bapek. Kami hanya investigasi saja," katanya lagi.

Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra yang ditemui di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, berharap inspektorat bisa bergerak cepat menelusuri informasi tersebut. "Harus cepat, biar tidak melebar kemana-mana. Kalau dugaan itu benar, beri sanksi. Kalau salah, tentu harus direhabilitasi namanya," tegas Sutjidra. (eps/gup)



Mangasi Mangkir Lagi

Pada Sidang Kasus Korupsi BP3TKI

DENPASAR- Rencana konfrontasi para saksi dan terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan lahan kantor BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Bali di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (28/10) batal. Penyebabnya, Inspektur Jenderal BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Mangasi Simanjuntak kembali mangkir.

"Saya sudah telepon namun tidak aktif. Tidak bisa saya menemui Mangasi," ujar Wahyudi Matodang alias Dodik.

Pada sidang sebelumnya, Man-

gasi juga sudah dipanggil. Dia mengirimkan surat sakit stroke. Meski sidang tanggal 21 Oktober, dalam surat sakit menyatakan tanggal 30 Oktober 2015. "Jadi begini saja, lantaran Mangasi tidak datang. Tetap panggil lagi, termasuk Dodik datang lagi minggu

depan. Sekarang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa," jelas Ketua Majelis Hakim Edward Harris Sinaga didampingi hakim anggota Dewa Suardita dan Nurbaya Goal yang menyidangkan terdakwa Wayan Pagueh dan Prio Adi Santoso ■

► Baca *Mangasi...* Hal 31

Saya menerima uang Rp 67 juta."
Putu Candra
Notaris

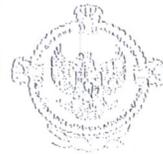


MIFTAHUDIN/RADAR BALI

AKUI SALAH: Terdakwa Wayan Pagueh (kiri) mengakui kesalahannya menerima uang Rp 200 juta hasil mark up pengadaan lahan BP3TKI di Sanur.

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal. : 21



Sambungan - - -

Notaris Akui Terima Uang

Rp 67 Juta

■ MANGASI

Sambungan dari hal 21

Sidang kemarin, semestinya kembali melakukan konfrontasi Mangasi, Wahyudi Matodang alias Dodik dengan yang lain. Untuk memperjelas terkait penyerahan dana Rp 1,5 miliar dari terdakwa Prio Adi Santoso dan Trusdy Prio Sambodo ke Dodik. Semua saksi menyatakan Dodik menerima, sedangkan Dodik membantah sendiri. Mangasi adalah orang pusat yang disebut datang ke Bali, saat penyerahan uang itu bersama dengan Dodik.

Sementara itu, dalam pemeriksaan terdakwa, penjelasan Wayan Pageh dan Prio tidak mengalami perubahan. Mereka tetap menyatakan bahwa dana Rp 1,5 miliar yang ditarik dua kali untuk Dodik. Selain itu Pageh mengatakan bahwa setelah anggaran pengadaan lahan lolos, memang Dodik sangat sering menghubunginya. "Memang sangat sering Pak Dodik yang menelepon saya," jelas Pageh.

Sedangkan Pageh juga mengakui menerima Rp 200 juta. Dia mengaku salah atas per-

buatan ini, walaupun uang itu dibagikan ke staf, dia hanya menikmati Rp 100 juta saja. Sedangkan Prio menyatakan memang ada uang Rp 450 juta yang diambil, tetapi semuanya proses pengurusan administrasi.

Menariknya dalam sidang kemarin, sebelum agenda konfrontasi dilakukan, ada tiga saksi yang dihadirkan. Yaitu dari BPK Wilayah Bali terkait kerugian Negara, BPN, dan notaris Putu Candra. Putu Candra ini akhirnya mengakui memang pihaknya juga menikmati uang Rp 67 juta. "Saya menerima uang Rp 67 juta," ungkapnya.

Dia mengatakan diberikan oleh Paramartha (pemilik lahan/tersangka, Red) namun ada yang mengatakan dibawakan oleh Prio. Ini sempat dikejar oleh hakim. Selain itu, notaris Putu Candra juga sedikit panik, lantaran hakim mengejar uang Rp 67 juta. "Apa fungsi uang itu. Itu uang hasil dari Rp 2,2 miliar (mark up)," cetus hakim. Notaris Putu Candra mengatakan dana itu untuk biaya pihaknya membuat proses jual beli dan lainnya. "Itu memang uang untuk biaya

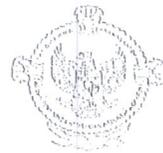
notaris, saya terima Rp 67 juta," kilahnya.

Seperti halnya berita sebelumnya nama Dodik memang dianggap kebal. Dia diduga sebagai otak kasus ini. Dia ikut dari awal pengadaan lahan bahkan saat nego di Restoran Tekko sampai akhir mengambil dana. Dalam dakwaan dijelaskan, bahwa tahun 2013, dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) BP3TKI terdapat anggaran beli tanah untuk kantor. Pagu anggaran Rp 7,5 miliar. Akhirnya dipilih lokasi lahan di Jalan Danau Tempe Nomor 29, Denpasar (Sanur).

Negosiasi dilakukan oleh Prio dengan pemilik lahan, Paramartha seluas 460 meter persegi atau 4,7 are dengan nilai Rp 4,5 miliar. Hasil negosiasi ini dilaporkan ke Pageh. Selanjutnya Pageh dan Prio bertemu dengan Paramartha. Saat itu sudah ada negosiasi untuk mengangkat harga alias *mark up*. Pageh mengatakan akan membeli tanah itu Rp 4,5 miliar dan akan dinaikan menjadi Rp 6,7 miliar. Yang akan diterima Paramartha selaku pemilik tanah Rp 4,5 miliar. Sisanya untuk kepentingan Wayan Pageh dkk. (art/yes)

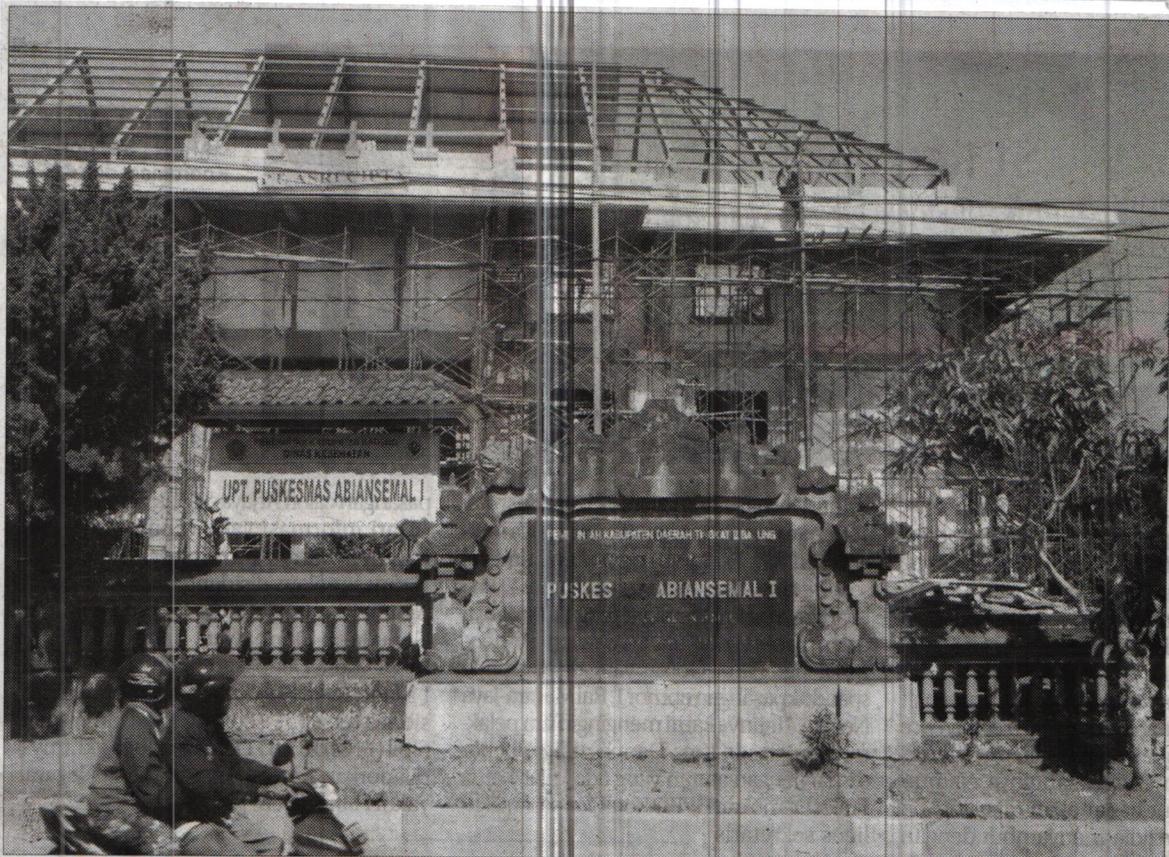
Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal. : 31



Sedot Rp 17 M,

Puskesmas Abiansemal 1 "Amburadul"



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

DIKEJAR DEADLINE : Tampak depan Puskesmas Abiansemal yang terancam molor penyelesaian proyeknya.

MANGUPURA - Dibangun dengan biaya Rp 17 miliar lebih, proyek pembangunan Puskesmas Abiansemal 1 terancam tidak selesai tepat waktu alias molor. Pasalnya, dua bulan menjelang akhir tahun, proyek terpantau masih jauh dari harapan. Target terakhir proyek harus kelar pada tanggal 23 Desember. Bagiar atap misalnya. Pantauan koran ini kemarin (28/10), bagian atap masih belum terpasang atap sama sekali. Kondisi yang sama juga terjadi pada bagian lain terlihat masih "amburadul".

Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung Ni Putu Dessy Darmayanti mengaku telah memperingatkan kepada rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek. Pasalnya, dari peninjauan yang telah dilakukan pada sejumlah kegiatan fisik, ternyata deviasi atau

progressnya sangat kecil. "Setelah libur lebaran memang progress proyek mengecil. Memang masih di atas target, tapi deviasinya sangat kecil. Makanya kami mengingatkan rekanan agar melakukan percepatan," ujar Dessy.

Pejabat asal Denpasar itu menegaskan, pihaknya sudah melakukan peninjauan ke proyek-proyek fisik untuk mengetahui perkembangan dilapangan, termasuk memberikan arahan-arahan. "Agar pengerjaannya lebih cepat, kami minta rekanan menambah tenaga kerja," ujarnya.

Pihaknya tak menyingkinkan adanya proyek yang penyelesaiannya tak sesuai jadwal, karena bisa merugikan rekanan itu sendiri. Sebab, mereka harus membayar denda atau penalti dari keterlambatan. (san/han)

Edisi : Kamis, 29 Oktober 2015

Hal. : 24